**Invention: Journal Research and Education Studies
Volume 6 Nomor 2 Juli 2025**

The Invention: Journal Research and Education Studies is published three (3) times a year

(March, July and November)

Focus : Education Management, Education Policy, Education Technology, Education Psychology, Curriculum Development, Learning Strategies, Islamic Education, Elementary Education

LINK : <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jres>

Komodifikasi Pendidikan dalam Masyarakat Kapitalis: Kajian Literatur Kritis

Arya Adiyasa¹, Yustika Irfani Lindawati²

^{1,2} *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia*

ABSTRACT

Education is meant to be a space of emancipation, a place where individuals can grow and develop free from economic or social barriers. Yet in the reality of capitalist societies, education has gradually shifted into a commodity something to be bought, sold, and evaluated through the lens of profit and loss. This article explores that transformation through a critical literature review, drawing on the works of thinkers such as Apple, Bourdieu, Becker, and Giroux. Using a qualitative approach within the framework of sociology of education, this study finds that the commodification of education not only creates inequality in access and quality but also erodes the humanistic values of the learning process. Education becomes an arena of economic selection, rather than a right inherent to all. Even so, spaces of resistance persist in the form of social movements, critical pedagogy, and community-based educational models rooted in justice. This article underscores the urgency of reclaiming education as a means of liberation, not merely as a tool for producing labor.

Kata Kunci

Commodification, Capitalism, Sociology of Education

**Corresponding
Author:**

aryaadiyasa78@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, pendidikan mengalami transformasi signifikan dalam masyarakat kapitalis, terutama dengan menguatnya ideologi neoliberalisme yang merasuk ke berbagai sektor kehidupan, termasuk institusi pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai hak dasar manusia dan alat emansipatoris yang mampu membebaskan individu dari belenggu ketertinggalan sosial, melainkan telah menjadi bagian dari mekanisme pasar yang tunduk pada logika akumulasi kapital. Fenomena ini dikenal sebagai komodifikasi pendidikan, yakni proses di mana nilai guna pendidikan diubah menjadi nilai tukar, menjadikannya sebagai komoditas yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam kerangka relasi pasar (Apple, 2006). Sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan bukan lagi

ruang publik yang terbuka bagi semua warga negara, melainkan menjadi institusi yang diprivatisasi, dikomersialisasikan, dan berorientasi pada efisiensi serta profitabilitas, sering kali dengan mengorbankan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial (Rikowski, 2001).

Komodifikasi pendidikan tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan merupakan konsekuensi logis dari dominasi sistem kapitalisme global yang menempatkan pasar sebagai mekanisme utama pengatur kehidupan sosial. Pendidikan dikonstruksi sebagai investasi pribadi yang bertujuan untuk meningkatkan "human capital", sejalan dengan tesis Gary Becker yang memandang pendidikan sebagai sarana peningkatan produktivitas individu dalam pasar tenaga kerja (Becker, 1993). Pendekatan ini mendorong pergeseran paradigma pendidikan dari model berbasis hak dan pelayanan publik menuju pendekatan berbasis pasar dan kompetisi, di mana akses terhadap pendidikan bermutu menjadi privilese bagi mereka yang memiliki sumber daya ekonomi. Hal ini terlihat dalam tren meningkatnya biaya pendidikan tinggi, maraknya lembaga pendidikan swasta elite, serta pelibatan sektor korporasi dalam penyusunan kurikulum dan manajemen pendidikan (Brown, Lauder, & Ashton, 2011).

Di Indonesia, gejala komodifikasi pendidikan turut menguat seiring deregulasi dan desentralisasi sistem pendidikan yang membuka ruang luas bagi privatisasi dan liberalisasi. Kebijakan seperti UU BHP (Badan Hukum Pendidikan), meski telah dibatalkan, mencerminkan kecenderungan negara untuk mengurangi peran sebagai penyedia layanan pendidikan dan menyerahkannya pada mekanisme pasar (Haryatmoko, 2016). Institusi pendidikan berlomba menawarkan fasilitas modern, program akselerasi, hingga kerjasama internasional sebagai nilai jual yang ditujukan pada konsumen pendidikan dari kelas menengah dan atas. Sementara itu, kelompok marginal justru semakin terpinggirkan dalam sistem yang mengutamakan daya beli sebagai syarat partisipasi. Dalam kerangka Bourdieuan, pendidikan bukan lagi alat mobilitas sosial, melainkan arena reproduksi kelas sosial, di mana habitus dan kapital budaya kelompok elite direproduksi melalui mekanisme seleksi yang tampak netral namun sarat bias struktural (Bourdieu & Passeron, 1990).

Dampak dari komodifikasi pendidikan tidak hanya bersifat material, melainkan juga ideologis. Pendidikan kehilangan otonominya sebagai ruang produksi pengetahuan kritis dan berubah menjadi pabrik pencetak tenaga kerja yang tunduk pada logika pasar kerja fleksibel. Mahasiswa didorong untuk memilih jurusan berdasarkan prospek gaji, bukan minat atau relevansi sosial; riset diarahkan untuk mendukung inovasi industri, bukan untuk mengkritisi

struktur ketidakadilan sosial (Giroux, 2014). Dalam situasi ini, pendidikan tinggi terancam menjadi instrumen reproduksi hegemoni kapitalisme, menjauh dari cita-cita transformatif yang selama ini menjadi fondasi sosiologi pendidikan.

Maka dari itu, kajian kritis terhadap komodifikasi pendidikan menjadi sangat relevan dan mendesak dalam konteks sosiologi pendidikan. Penelitian ini berupaya memetakan bagaimana proses komodifikasi berlangsung, aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, serta dampaknya terhadap struktur sosial dan peran pendidikan dalam masyarakat. Dengan mengkaji literatur-literatur mutakhir dan mendialogkannya dalam kerangka teori kritis, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi, tetapi juga membuka ruang bagi pemikiran alternatif mengenai masa depan pendidikan yang lebih demokratis, adil, dan emansipatoris. Dalam konteks ini, pendidikan bukan sekadar instrumen teknokratis, melainkan medan perjuangan ideologis yang menentukan arah transformasi sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur kritis (*critical literature review*) sebagai desain utama. Kajian literatur kritis dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami dan mengkritisi fenomena komodifikasi pendidikan dalam kerangka kapitalisme global melalui lensa sosiologi pendidikan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis literatur yang ada secara mendalam, tidak hanya secara deskriptif, tetapi juga secara reflektif dan teoritis, dengan mempertimbangkan konteks sosial-politik yang melingkupi produksi wacana pendidikan (Snyder, 2019).

Dalam pendekatan ini, peneliti tidak sekadar mengumpulkan literatur yang relevan, melainkan juga mengkaji bagaimana wacana komodifikasi pendidikan dibentuk, disebarluaskan, serta berimplikasi terhadap praksis pendidikan dan struktur sosial. Hal ini sesuai dengan semangat sosiologi kritis yang tidak hanya bertujuan memahami dunia, tetapi juga mengubahnya (Kincheloe & McLaren, 2011).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang sistematis terhadap berbagai sumber ilmiah, baik berupa jurnal akademik, buku, laporan penelitian, maupun dokumen kebijakan yang relevan dengan tema komodifikasi pendidikan. Literatur yang digunakan akan dipilih berdasarkan relevansi teoretis, kredibilitas ilmiah, dan keterkiniannya. Basis data yang digunakan mencakup Google Scholar, Scopus, JSTOR, SAGE Journals, dan portal nasional seperti Garuda dan Neliti. Kata kunci pencarian

mencakup "commodification of education", "neoliberalism in education", "sociology of education", "marketization", "educational inequality", serta padanan Bahasa Indonesia-nya. Literatur akan dipilih dari rentang waktu 15 tahun terakhir untuk menjaga relevansi kontekstual, namun tidak menutup kemungkinan menggunakan karya klasik sebagai landasan teoretis.

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi tematik kritis (critical thematic content analysis). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema dominan dalam wacana komodifikasi pendidikan, serta menelaahnya dalam relasi kuasa dan struktur sosial-ekonomi yang melingkupinya. Peneliti akan mengklasifikasikan literatur berdasarkan tema seperti: (1) privatisasi pendidikan, (2) pendidikan sebagai komoditas ekonomi, (3) peran negara dan pasar, (4) dampak terhadap keadilan sosial, serta (5) resistensi dan alternatif pedagogis. Setiap tema akan dianalisis menggunakan lensa teori kritis, seperti teori reproduksi Bourdieu (1990), teori ekonomi-politik pendidikan Apple (2006), serta wacana neoliberalisme pendidikan menurut Giroux (2014) dan Rizvi & Lingard (2010).

Langkah-langkah analisis dilakukan secara iteratif, dimulai dari membaca literatur secara mendalam, mengkode temuan kunci, menyusun kategori tematik, hingga menarik sintesis teoretis yang mengaitkan antara data literatur dan kerangka teori. Validitas data dijaga melalui proses triangulasi sumber dan dialog kritis terhadap teks, serta refleksi posisi peneliti sebagai bagian dari struktur sosial yang dikaji (Charmaz, 2006).

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan kritis mengenai bagaimana pendidikan dalam masyarakat kapitalis telah direduksi menjadi komoditas ekonomi, serta bagaimana proses ini memperkuat reproduksi ketimpangan sosial dalam sistem pendidikan kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dunia yang semakin dikuasai oleh logika pasar, pendidikan perlahan-lahan kehilangan ruhnya sebagai ruang pembebasan dan menjadi ladang perburuan keuntungan. Dari hasil kajian literatur yang dianalisis secara kritis, dapat ditarik benang merah bahwa komodifikasi pendidikan dalam masyarakat kapitalis bukan sekadar wacana akademik yang abstrak, melainkan realitas nyata yang hari ini kita saksikan dan rasakan, terutama oleh mereka yang berada di pinggiran baik secara geografis maupun sosial. Empat tema besar yang muncul dari kajian ini yakni privatisasi dan pasar bebas pendidikan, pergeseran makna pendidikan sebagai investasi, reproduksi ketimpangan sosial, dan munculnya bentuk-bentuk resistensi—menggambarkan bagaimana

sistem kapitalisme telah merampas hakikat pendidikan sebagai hak dasar manusia dan mengubahnya menjadi alat reproduksi kepentingan pasar.

Pertama, kita melihat bagaimana privatisasi menjadi wajah paling kasat mata dari komodifikasi pendidikan. Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi kini tidak ubahnya korporasi: punya target pemasaran, kompetitor, bahkan strategi branding. Sebagian universitas negeri sekalipun berlomba membangun gedung megah dan program internasional bukan semata demi kualitas pembelajaran, melainkan agar tampak menjual di mata "pasar" yaitu calon mahasiswa yang kini diposisikan sebagai konsumen. Pendidikan, yang semula dibayangkan sebagai jembatan peradaban, telah direduksi menjadi produk jasa. Ball dan Youdell (2008) mencatat bagaimana bentuk-bentuk privatisasi tidak selalu hadir dalam bentuk swastanisasi langsung, tetapi bisa juga melalui logika manajerial, kontrak dengan pihak ketiga, dan orientasi kinerja berbasis output, yang semuanya membawa semangat pasar ke dalam sistem pendidikan publik. Di Indonesia, kita bisa merasakan denyutnya dalam praktik uang pangkal yang tinggi, komersialisasi program pascasarjana, hingga perguruan tinggi yang menggandeng industri dalam menentukan arah kurikulum. Pada titik ini, idealisme pendidikan kian terjepit.

Kedua, komodifikasi telah menggeser makna pendidikan dari hak publik menjadi investasi individu. Paradigma ini terlihat dalam narasi populer: "sekolah yang tinggi agar gajimu besar". Pendidikan tak lagi dipahami sebagai alat kritis untuk mengubah dunia, tetapi semata sebagai jalan tol menuju mobilitas sosial. Tidak salah memang bermimpi untuk hidup lebih baik, tetapi ketika sistem hanya menghargai pendidikan dari nilai jualnya di pasar kerja, maka ada sesuatu yang hilang. Teori *human capital* karya Becker (1993) menjadi landasan ideologis utama yang mengafirmasi pandangan ini bahwa manusia adalah sumber daya yang dapat diukur efisiensinya, dan pendidikan adalah modal investasi yang kelak mendatangkan keuntungan. Akibatnya, mata pelajaran yang tidak dianggap produktif secara ekonomi seperti seni, filsafat, atau sosiologi itu sendiri dipandang sebelah mata. Sekolah dan universitas pun mengarahkan orientasinya pada pencapaian IPK, sertifikasi, dan kompetensi pasar, bukan pada pemahaman kritis, kepekaan sosial, atau keberanian bertanya.

Ketiga, dampak dari komodifikasi ini sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal reproduksi ketimpangan sosial. Pendidikan yang seharusnya menjadi ruang yang setara justru mereproduksi jurang antara si kaya dan si miskin. Di kota-kota besar, sekolah internasional dengan biaya fantastis menjanjikan akses ke universitas luar negeri dan jaringan profesional elite, sementara di daerah pinggiran, banyak anak harus berjalan kaki berkilo-

kilo meter hanya untuk menuntut ilmu di sekolah yang kekurangan guru dan fasilitas. Fenomena ini menggambarkan dengan jelas teori Bourdieu (1990) tentang *habitus* dan *kapital budaya*, di mana sistem pendidikan tidak netral, melainkan cenderung mereproduksi posisi sosial yang sudah ada. Anak dari keluarga elite cenderung lebih mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan sistem, sementara anak dari keluarga miskin harus berjuang dengan beban ganda: keterbatasan ekonomi dan ketimpangan simbolik. Apple (2006) pun menegaskan bahwa standarisasi pendidikan melalui ujian nasional dan akreditasi justru memperkuat hierarki sosial dan menghambat siswa dari kelompok marjinal untuk berkembang secara penuh.

Namun di tengah suramnya kenyataan ini, ada titik terang berupa resistensi. Gerakan mahasiswa yang menolak kenaikan UKT, guru yang menolak dikomersialisasi, orang tua yang menuntut keadilan anggaran pendidikan semuanya merupakan bentuk-bentuk perlawanan terhadap dominasi pasar dalam pendidikan. Di berbagai negara, muncul inisiatif pendidikan alternatif berbasis komunitas, pendidikan kontekstual, dan kurikulum yang membumi. Giroux (2014) menyebut pendidikan sebagai “praktik kebebasan” yang harus terus diperjuangkan, bukan dikorbankan di altar efisiensi ekonomi. Di Indonesia sendiri, gerakan seperti Sekolah Rakyat atau pendidikan berbasis pesantren dan adat lokal masih bertahan sebagai bentuk resistensi terhadap sistem yang semakin korporatis. Harapan tumbuh dari mereka yang percaya bahwa pendidikan bukan tentang laba, melainkan tentang cinta–cinta pada pengetahuan, pada kemanusiaan, dan pada dunia yang lebih adil.

KESIMPULAN

Komodifikasi pendidikan dalam masyarakat kapitalis telah mengubah pendidikan dari hak sosial menjadi komoditas pasar. Melalui privatisasi, logika neoliberal, dan dominasi orientasi profit, pendidikan kini lebih menekankan nilai ekonomis daripada nilai humanistik. Akibatnya, pendidikan justru memperkuat ketimpangan sosial dan melemahkan fungsinya sebagai alat transformasi sosial. Meski demikian, masih terdapat ruang resistensi yang muncul dari komunitas pendidikan, gerakan sosial, hingga model pendidikan alternatif. Ini menunjukkan bahwa pendidikan masih bisa direbut kembali sebagai ruang pembebasan yang demokratis dan berkeadilan.

Oleh karena itu, disarankan agar pendidikan dikembalikan pada orientasi humanistik dan sosial. Negara harus memperkuat peran publik dalam pendidikan dan menolak liberalisasi yang melemahkan akses dan keadilan. Di sisi lain, pendidik perlu mengembangkan pendekatan kritis yang membangun

kesadaran sosial peserta didik, agar pendidikan tidak hanya menjadi alat mobilitas, tetapi juga perjuangan untuk dunia yang lebih adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Apple, M. W. (2006). *Educating the "Right" Way: Markets, Standards, God, and Inequality* (2nd ed.). Routledge.
- Ball, S. J., & Youdell, D. (2008). Hidden privatization in public education. *Education International Report*, 5, 1-41.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1990). *Reproduction in Education, Society and Culture* (2nd ed.). Sage Publications.
- Brown, P., Lauder, H., & Ashton, D. (2011). *The Global Auction: The Broken Promises of Education, Jobs, and Incomes*. Oxford University Press.
- Charmaz, K. (2006). *Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis*. SAGE Publications.
- Giroux, H. A. (2014). *Neoliberalism's War on Higher Education*. Haymarket Books.
- Haryatmoko. (2016). Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi dalam Bahasa. *Kompas*.
- Kincheloe, J. L., & McLaren, P. (2011). Rethinking Critical Theory and Qualitative Research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (4th ed., pp. 163-177). Sage.
- Rikowski, G. (2001). The Battle in Seattle: Its Significance for Education. *London Institute for Education*, 1(1), 1-24.
- Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). *Globalizing Education Policy*. Routledge.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Susanti, D. (2021). Komodifikasi pendidikan tinggi di Indonesia: Antara kebijakan dan realitas pasar. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 5(2), 123-138.